

ISSN 1411- 3341

5

IDEOLOGI MEDIA MASSA DAN PENGEMBANGAN CIVIL SOCIETY

Oleh : Mahpuddin

ABSTRAK

Pemikiran global terhadap indeks pertumbuhan ekonomi makro telah mereduksi realitas ekonomi rakyat yang semakin terpuruk. Harga minyak tanah dan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) semakin tidak terjangkau oleh sebahagian masyarakat ekonomi kelas bawah. Pengangguran tampak menggejala dimana sementara pertumbuhan penduduk nyaris tidak terkendali. Dalam konteks ini, institusi media massa idealnya memihak kepada kepentingan publik dan tidak menjadi corong bagi manipulasi isu para pejabat pemerintah.

Pada sisi lain media sering dituding sebagai pihak penyebar eskalasi konflik sosial. Beberapa tahun belakangan ini, merebaknya konflik sosial bernuansa SARA tidak bisa dilepaskan dari peran publikasi yang dilakukan oleh media massa. Misalnya konflik Ambon dan Poso menjadi isu konflik pada level nasional yang melibatkan aktor dan tokoh di Jakarta karena *blow-up* yang dilakukan oleh media. Realitas konflik bukan hanya terjadi di lapangan (realitas nyata) tetapi mengalami pembiasan di dunia maya. Apa yang didefinisikan sebagai realitas sosial merupakan agregasi dari berbagai pertarungan wacana yang ditampilkan oleh media. Dalam konteks ini media tidak lagi dinilai sebagi sumber penyejuk dan wadah dialog atas berbagai diskursus publik menuju konsesnsus bersama tetapi menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan diferensiasi dan konflik sosial. Pertanyaan yang kemudian mengemuka, mengapa media tidak bisa bersifat netral dan obyektif ?

Kata Kunci: Ideologi, Media Massa dan Civil Society

PENDAHULUAN

Media massa sebagai salah satu sub-sistem sosial secara historis dan filosofis dibangun demi memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Sebagaimana dalam kajian teori komunikasi massa dimana media massa diposisikan sebagai agen pembaharuan. Posisi tersebut memang tidak berlebihan karena media massa memiliki potensi dalam mempengaruhi alam pikiran publik. Dengan demikian publik merindukan publikasi media massa yang sehat, jujur dan memiliki resposibilitas terhadap kehidupan social yang lebih baik.

Terdapat kesenjangan antara dunia idealitas media massa dengan realitas operasional media massa. Beberapa pemerhati media massa merasa pesimis dan skeptis terhadap kembalinya otoritas nilai idealisme media di dunia praksis. Sebut saja misalnya skeptis dikemukakan oleh Agus Sudibyo dalam bukunya, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, bahwa mengidentikkan reformasi media pasca-1998 dengan sebuah proses demokratisasi merupakan sebuah kekeliruan. Kini kita menyaksikan lahirnya pers-pers partisan yang hanya menyerukan kepentingan dan versi para pemiliknya dan bernaflu menghabisi lawan-lawan politiknya.

Menurut Agus Sudibyo, revolusi Mei 1998 merupakan bagian dari revolusi yang lebih besar yakni revolusi kapitalisme global yang bersumber pada kaidah-kaidah neoliberalisme ekonomi global. Sebagai bagian dari proses liberalisme ekonomi global, kebebasan pers pasca Orde Baru sangat mungkin akan semakin mengarah pada suatu kebebasan pers yang berpihak pada kepentingan ekspansi dan akumulasi modal. Dengan perkataan lain, kini telah terjadi peralihan dari era *state regulation* menuju *market regulation* ternyata menjadi sebuah dilema. Dalam banyak segi *state regulation* bersifat kontaproduktif bagi demokrasi. Namun pada saat yang sama ketika *state regulation* dihapuskan, pers cenderung keluar dari jalurnya dan tidak dapat bersikap proporsional dalam menjalani fungsi-fungsinya.

Sementara kepentingan-kepentingan *market regulation* cenderung bersikap kompromistis terhadap fenomena pers tersebut.

Ideologi; Terselubung Namun Menentukan Arah Kebijakan Media

Dalam berbagai literatur yang mengkaji tentang aspek ideologis di balik operasionalitas media massa tergolong masih langka. Apa yang sering mengemuka lebih bersifat teoritik akademik dengan lebih menonjolkan aspek sosiologis dibandingkan aspek filosofis dan ideologis yang mendalam. Beberapa penulis kontemporer sebut saja misalnya; James Lull, Roland Barthes, Baudrillard dan beberapa penulis lainnya. Khusus di Indonesia muncul penulis berbakat seperti Yasraf Amir Piliang yang dengan cerdas dan piawai dalam menyoroti persoalan fenomena media massa menurut perspektif filsafat Postmodernisme. Dalam tulisan ini tampaknya banyak merujuk pada pemikiran Yasraf dari berbagai tulisan-tulisannya, baik melalui jurnal ilmiah maupun melalui buku-bukunya yang secara serius dan mendalam mengkaji persoalan ini.

Menurut Yasraf Amir Piliang, pengkajian tentang media massa tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada di balik media tersebut, khususnya kepentingan terhadap informasi yang disampaikan. Di dalam perkembangan media mutakhir, setidaknya-tidaknya ada dua kepentingan utama (eksternal media) yaitu kepentingan ekonomi (*economic interest*) dan kepentingan kekuasaan (*power interest*) yang membentuk isi media (*media content*) berupa informasi yang disajikan dan makna yang ditawarkannya. Di antara dua kepentingan utama tersebut, ada kepentingan yang lebih mendasar yang justru terabaikan, yaitu kepentingan publik. Media yang seharusnya berperan sebagai ruang publik (*publik sphere*) sering diabaikan oleh kuatnya dua kepentingan tersebut.

Kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik inilah sesungguhnya menjadikan media tidak dapat bersikap netral, jujur, adil, obyektif dan terbuka. Akibatnya, informasi yang disuguhkan

oleh media telah menimbulkan persoalan obyektivitas pengetahuan yang serius pada media itu sendiri. Kepentingan-kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik akan menentukan apakah informasi yang disampaikan oleh sebuah media mengandung kebenaran (*truth*) atau kebenaran palsu (*pseudo-truth*), menyampaikan obyektivitas atau subyektivitas, bersifat netral atau memihak, merepresentasikan fakta atau memelintir fakta, menggambarkan realitas (*reality*) atau mensimulasi realitas (*simulacrum*).

Publik pada umumnya berada diantara dua kepentingan utama media, yang menjadikan mereka sebagai mayoritas yang diam, yang tidak mempunyai kekuasaan dalam membangun dan menentukan informasi di ranah publik (*public sphere*) milik mereka sendiri. Di satu pihak ketika ranah publik dikuasai oleh politik informasi atau politisasi informasi yang menjadikan informasi sebagai alat kekuasaan politik, media pun menjadi perpanjangan tangan penguasa dengan menguasai ruang publik. Di pihak lain ketika media dikuasai oleh kekuatan para pemilik modal (ekonomi politik informasi), informasi pun menjadi alat kepentingan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan cara mengeksploitasi publik, sebagai salah satu prinsip dasar kapitalisme.

Perdebatan mengenai media massa sebagai sebuah wacana (*discourse*), tidak dapat dipisahkan dari relasi saling keterkaitan antara bahasa yang digunakan di dalamnya, pengetahuan (*knowledge*) yang melandasinya, serta bentuk-bentuk kepentingan dan kekuasaan (*power*) yang beroperasi di balik bahasa dan pengetahuan tersebut. Perbincangan mengenai media tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang membentuknya yang pada akhirnya mempengaruhi bahasa (gaya, ungkapan, kosa kata dan tanda) yang digunakan dan pengetahuan (keadilan, kebenaran, realitas) yang dihasilkannya.

Selain itu, perbincangan mengenai media dalam konteks kepentingan-kepentingan di baliknya, pada kenyataanya tidak dapat

dilepaskan dari berbagai paradoks pengetahuan yang juga dihasilkannya. Berbagai paradoks pengetahuan yang muncul ketika media menjadi bagian dari sebuah sistem ideologi (ekonomi atau politik) dan sistem kekuasaan yang sangat menentukan arah perkembangannya dengan mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas.

Apa yang disebut sebagai hiperealitas media sesungguhnya berkembang ketika media dikendalikan oleh dua kepentingan utama di atas yang di dalamnya obyektivitas, kebenaran dan keadilan sebagai kepentingan publik kalah oleh subyektivitas permainan bahasa (*language game*). Sangatlah mungkin jika media berusaha untuk selalu merepresentasikan peristiwa secara obyektif, benar dan adil, namun oleh berbagai tekanan dan kepentingan ideologis tersebut di atas, telah menyebabkan media terperangkap ke dalam politisasi media yang implikasinya merugikan publik.

Lanjut Yasraf Amir Piliang menegaskan bahwa persoalan ideologi pada media muncul ketika apa yang disampaikan media (dunia representasi), tatkala dikaitkan dengan kenyataan sosial memunculkan berbagai problematika ideologis di dalam kehidupan sosial dan budaya. Pertanyaan-pertanyaan ideologis yang sering muncul mengenai politik media adalah, misalnya apakah media merupakan cermin atau refleksi dari realitas? Atau apakah sebaliknya menjadi cermin dari separuh realitas, dan menjadi topeng separuh realitas lainnya? Apakah media melukiskan realitas atau sebaliknya mendistorsi realitas.

Ketika media dikendalikan oleh berbagai kepentingan ideologis di baliknya maka, ketika menjadi cermin realitas (*mirror of reality*). Media sering dituduh sebagai perumus realitas (*definer of reality*) sesuai dengan ideologi yang melandasinya. Beroperasinya ideologi di balik media, tidak dapat dipisahkan dari mekanisme ketersembunyian (*invisibility*) dan ketidaksadaran yang merupakan kondisi dari keberhasilan sebuah ideologi. Artinya, sebuah ideologi

menyusup dan menanamkan pengaruhnya lewat media secara tersembunyi (tidak terlihat dan halus), dan ia merubah pandangan setiap orang secara tidak sadar. Ada berbagai mekanisme beroperasinya ideologi di dalam media, yang diantaranya adalah sebagai berikut; Pertama, mekanisme oposisi biner (*binary opposition*), yaitu mekanisme penciptaan disitribusi makna simbolik berdasarkan sistem kategori pasangan (binary) yang bersifat polaristik dan kaku. Setiap hal digeneralisir direduksi sedemikian rupa, sehingga ia hanya mendapat berada pada satu kutub (makna simbolik) yang ekstrim, kalau tidak pada kutub ekstrim di seberangnya. Tidak ada pilihan-pilihan tanda, kode, makna, dan bahasa yang beraneka ragam (polysemi).

Yang ada hanya pilihan hitam-putih. Mesin-mesin biner (*binery mecine*) ini, menurut Deleuze dan Parnet di dalam dialogue, biasanya digunakan oleh sistem kekuasaan yang represif dan totaliter. Mesin biner ini hanya memproduksi berbagai oposisi biner di dalam masyarakat; oposisi biner kelas sosial (penguasa/rakyat); oposisi biner seks (pria-wanita); oposisi biner ideologi (Pancasilais/antiPancasila); oposisi biner ras (kulit putih/kulit hitam), dsb. Mesin-mesin biner ini juga diterapkan di dalam sistem politik media dan politik informasi orde baru.

Kedua, akibat logis yang ditumbulkan oleh mesin-mesin oposisi biner, adalah berupa mekanisme paralogisme dan kekerasan simbolik di dalam media. Dalam hal ini, disebabkan otoritas kekuasaan yang dimilikinya, kelas dominan selalu mengidentifikasi diri mereka sebagai mulia, baik, benar. Sementara orang-orang dikuasai dimusuhi sebagai buruk, jahat, bersalah, subversif, kriminal. Kecenderungan membenaran diri sendiri semacam ini pada penguasa ketika diartikulasikan dalam media, menciptakan sebuah media yang di dalamnya beroperasi apa yang ada di dalam teori politik informasi disebut Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik (*symbolic violency*), yaitu sebuah bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak, yang menyembunyikan di balikinya pemaksaan dominasi. Dalam hal

ini, kekerasan simbolik tidak saja dilihat sebagai bentuk dominasi politik melalui media. Tetapi bentuk dominasi yang diakui secara salah (*misrecognized*) oleh publik, meskipun secara fakta diakui sebagai legitimate. Di dalam mekanisme kekerasan simbol, relasi komunikasi (*communicative relation*) saling bertautan dengan relasi kekuasaan (*power relation*), yang didalamnya hegemoni sebuah sistem kekuasaan dipertahankan dengan mendominasi (*mendistorsi*) produksi dan interpretasi terhadap media, bahasa, dan makna yang beroperasi di dalamnya, yang menciptakan pertandaan dan pemaknaan yang serba tunggal; mono-signification dan mono-semy.

Ketiga, adalah apa yang disebut oleh Paul L. Jalbert, di dalam language, image media, sebagai mekanisme *dereed/e dicto*. Dere berarti sesuatu hal, sedangkan de dicto berarti tentang apa yang dikatakan (mengenai sesuai hal). Dere mengandung transparansi serta kejelasan fakta dan referensi, sedangkan *de dicto* mengandung kekaburan dan ambiguitas fakta dan referensi media, misalnya, menciptakan de dicto, ketika ia menulis sebagai judul *headilline*-nya, presiden mengeluarkan dekrit. Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah presiden akan mengeluarkan dekrit bila situasi dianggap darurat. Tindakan yang akan dilakukan, diredusir oleh media, seolah-olah tindakan tersebut telah dilakukan, semata untuk menciptakan daya tarik dan provokasi terhadap pembaca. Distorsi dan pengaburan makna semacam itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari media dewasa ini, yang terperangkap di dalam paradigma provokasi (kapitalistik), semata untuk mempertahankan rating atau oplah.

Pemaksaan kekerasan, dan rekayasa di dalam media seringkali berlangsung halus dan tidak tampak, sehingga tidak disadari sebagai suatu pemaksaan, kekerasan, atau rekayasa. Artinya, semua satu bentuk rekayasa media yang meskipun demikian bukan sebuah bentuk kekerasan adalah apa yang disebut dengan hiperealitas media, yaitu penciptaan realitas-realitas artifisial di dalam media, yang menciptakan realitas (kebenaran, fakta, kebenaran) tandingan.

Media Massa dan Pembangunan *Civil Society*

Sulit dipungkiri bahwa media massa memainkan peran penting dalam upaya bersama membangun sebuah masyarakat sipil (*civil society*). Diseminasi informasi yang mentransformasikan pengetahuan khalayak berimplikasi pada pembentukan masyarakat yang cerdas dan kritis terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Terutama di negara-negara maju yang telah mempraktekkan sistem pemerintahan demokratis, tentu saja dimulai dari prakondisi masyarakatnya yang lebih dahulu menyadari sistem demokrasi. Kesadaran yang terakumulasi menjadi sebuah tuntutan yang bersifat massif.

Dalam konteks masyarakat sipil, menurut Dedy N. Hidayat, media massa semakin dituntut untuk memainkan peran mediasi antar berbagai kepentingan kelompok dalam masyarakat, atau antar pemerintah dan rakyatnya. Untuk memahami peran media massa, Dedy memaparkan sebuah konsep pemikiran yang pernah dipopulerkan oleh Habermas yaitu konsep *public sphere*. Menurutnya, diskursus seputar media massa, khususnya dalam konteks kajian seputar masyarakat madani dan demokratisasi, pada akhirnya akan sulit mengesampingkan keberadaan konsep *public sphere*. Sebagai suatu *ideal type*, kawasan publik atau ruang publik merujuk pada suatu celah di antara negara dan masyarakat madani, di mana setiap individu warga negara bisa melibatkan diri dalam diskursus tentang berbagai isu permasalahan bersama, dalam kerangka pencapaian konsensus di antara mereka sendiri ataupun untuk mengontrol negara dan pasar.

Dalam proses tersebut, media massa menempati posisi sentral, khususnya dalam era peradaban di mana praktis semua orang menjadi bagian dari kesepakatan untuk bersatu dalam kesatuan-kesatuan politik besar seperti negara. Media massa dalam konteks ini, berfungsi memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk penentuan sikap dan memfasilitasi pembentukan

opini publik dengan menempatkan dirinya sebagai wadah independen di mana isu-isu permasalahan umum bisa diperdebatkan.

Dalam sebuah *public sphere*, yang terpenting adalah terwujudnya prinsip-prinsip obyektivitas inter-media dan bukan hanya obyektivitas intra-media. Dedy memaparkan bahwa sulit untuk mengharapkan agar setiap media membuat pemberitaan obyektif, misalnya konflik bernuansa SARA di Indonesia. Arti realitas obyektif dalam perspektif Dedy merupakan penjumlahan atau agregasi dari berbagai realitas simbolik yang ditampilkan dan dipertarungkan sejumlah media, masing-masing dengan visi dan pandangannya sendiri.

KESIMPULAN

Agar tidak terjadi distorsi sistematis terhadap proses-proses pencapaian konsensus yang telah dan akan dibangun, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip *public sphere*.

1. Kawasan publik harus terjamin bebas dari pengaruh intervensi kekuasaan dan pasar. Selain itu, dalam kawasan publik juga tercipta distribusi kuasa yang sama antar individu yang terlibat di dalamnya. Sehingga akses ke kawasan itu pun harus terbuka lebar bagi setiap warga dan tidak ada pengistimewaan yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu.
2. Terbangun suatu kesepakatan dan komitmen bersama untuk mematuhi aturan-aturan penyelenggaraan sebuah diskursus rasional di mana setiap klaim kebenaran dapat diuji kebenaran, ketepatan dan kelayakannya melalui kaidah-kaidah rasional. Lebih penting lagi adalah kawasan publik harus terbebas dari distorsi permainan politik dan ekonomi, primordialisme, etnosentrisme dan berbagai fanatisme sempit lainnya.

Oleh sebab itu, menurut Dedy, pengertian kemandirian media massa lebih berkaitan dengan kemandirian dari pengaruh serta dominasi kelompok-kelompok yang ada dalam publik, kepentingan negara

serta tekanan pasar. Selain itu media massa diharapkan dapat berpihak pada norma-norma penyelenggaraan *public sphere* yang menjamin berlangsungnya diskursus rasional guna mencapai konsensus publik yang legitimatif.

Harus disadari bahwa media adalah realitas dalam dirinya sendiri. Kemampuan untuk menjamin pemain dalam industri media, contohnya, jelas tidak secara berimbang dimiliki oleh publik. Pemain industri media kita tampaknya hanya akan terdiri dari kaum yang itu-itu saja. Media pun memiliki fungsi ideologis, dan melakukan manuver politik sesuai dengan fungsi ideologisnya. Hal ini akan mencakup masalah siapa, kepentingan apa, dan perspektif mana yang akan memperoleh akses ke media mereka. Di luar fungsi ideologis yang dijalankan bagaimanapun juga, media pertama-tama perlu dilihat sebagai institusi ekonomi. Oleh sebab itu, media potensial melakukan manuver politik yang dijalankan melalui politik pemberitaannya yang dikemas sebagai komoditi informasi yang berusaha menyiasati tuntutan serta peluang pasar.

Hal lain yang penting diamati dalam pemberitaan media saat ini terutama berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana media telah berfungsi sebagai kekuatan utama penyangga tegaknya *public sphere*. Hal ini dapat dikaji melalui pengamatan tentang sejauh mana kemampuan untuk memiliki media yang kenyataannya semakin terpusat di tangan orang tertentu saja. Kemudian perlu juga dilakukan kajian tentang sejauh mana diskursus publik yang ditampilkan melalui keragaman isi media, merupakan suatu diskursus yang rasional, memiliki visi pencapaian rekonsiliasi atau konsensus dan terbebas dari distorsi rasionalitas permainan politik dan ekonomi. Tentu saja beberapa pertanyaan yang mengemuka di atas merupakan tantangan bagi pihak pengelola media.

Jika demikian halnya berarti media diharapkan akan senantiasa mengedepankan kepentingan publik dan tidak menonjolkan kepentingan golongan atau kelompok masyarakat tertentu. Hanya

saja kadang-kadang harapan normatif tersebut jauh dari kenyataan. Telah terbangun sebuah atmosfir berpikir masyarakat bahwa media tetap merupakan institusi yang berkepentingan. Media adalah industri yang senantiasa berorientasi profit atau keuntungan ekonomi. Untuk itu diperlukan pemahaman tentang proses media dalam mengkonstruksikan sebuah realitas dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan, Deden. 1998. *Kebenaran Realitas Media Bersifat Subyektif*. Kompas, hal. 4, tanggal 9, Jakarta.
- Halloran, J.D. 1995. *The Effects of Mass Communication*; Leicester University Press.
- Kalpper, J. 1960. *The Effects of Mass Communication*. New York, Free Press
- Littlejohn, Stephen W. 1996. *Theories of Human Communication*. Fifth Edition. Wadsworth Publishing Company, Humboldt State University.
- Lull, James. 1998. *Media, Communication, Culture: A Global Approach*. Diterjemahkan oleh A. Setiawan Abadi, Yayasan Obor, Jakarta.
- McQuail, Denis. 1991. *Mass Communication Theory*. Second Edition. Diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram, Erlangga, Jakarta.
- Piliang, Yasraf Amir, 2003. *Hipersemiotika*, Jalasutra, Yogyakarta
- _____, 2004. *Posrealitas*, Jalasutra, Yogyakarta
- Simaremare, M. 1998. *Mencegah Realitas Media Menjadi Kebenaran Semu*. Kompas, hal. 4, tanggal 12, Jakarta.
- Sudibyo, Agus. 2001. *Politik Media Dan Pertarungan Wacana*. LKiS Yogyakarta.
- Susanto, S. Astrid. 1982. *Komunikasi Kontemporer*. Binacipta, Bandung